

Tahun Politik, Komunikasi Konfrontatif

Sam Abede Pareno¹

Abstract

Term “Confrontative Communication” popular in Indonesia when the election of Governor of Jakarta at 2012. In that year, one candidate often talk intimidation people and his competitor with using sarcastic sentence, for example “If you will not choose Betawi man, please out from Jakarta or I will disarm your facilities included your KTP (kartu tanda penduduk, identification card)”.

Confrontative Communication different with Confrontation Communication in medical work which is done by doctor or nurse. Confrontative Communication is a part of coersive communication which is used in political communication. Every candidate use confrontative communication to defeat competitor; among them use it each other.

Now, in the politics year for winning the election especially president election, confrontative communication without controlled by politics ethics tends to be used in political communication. This article want to clarify that phenomena.

Key words: *political communication, coersive communication, confrontative communication.*

Abstrak

Istilah "Komunikasi Konfrontatif" populer di Indonesia ketika pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2012. Pada tahun itu, satu kandidat sering berbicara dengan orang-orang intimidasi dan kompetitornya dengan menggunakan kalimat sarkastik, misalnya "Jika Anda tidak akan memilih pria Betawi, silakan keluar dari Jakarta atau saya akan melucuti fasilitas Anda termasuk KTP Anda (kartu tanda penduduk, kartu identitas)".

Komunikasi konfrontatif berbeda dengan Komunikasi Konfrontasi dalam pekerjaan medis yang dilakukan oleh dokter atau perawat. Komunikasi konfrontatif adalah bagian dari komunikasi koersif yang digunakan dalam komunikasi politik. Setiap kandidat menggunakan komunikasi konfrontatif untuk mengalahkan pesaing; di antara mereka menggunakannya satu sama lain.

Sekarang, di tahun politik untuk memenangkan pemilihan terutama pemilihan presiden, komunikasi konfrontatif tanpa dikendalikan oleh etika politik cenderung digunakan dalam komunikasi politik. Artikel ini ingin mengklarifikasi fenomena itu.

Kata kunci: komunikasi politik, komunikasi koersif, komunikasi konfrontatif.

¹Sam Abede Pareno, guru besar Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya

Pendahuluan

Ketika berlangsung kampanye pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2012, salah seorang calon sering melontarkan kalimat-kalimat yang mengancam kepada masyarakat Jakarta. Misalnya, “Kalau kalian tidak memilih orang Betawi, silakan keluar dari Jakarta, atau saya akan melucuti fasilitas kalian termasuk KTP kalian”.

Kalimat tersebut dianggap tidak sopan dan melukai hati rakyat Jakarta yang berniat untuk tidak memilih calon yang mengancam seperti itu. Si calon dianggap melakukan komunikasi konfrontatif yang merupakan bagian dari komunikasi koersif, bahkan lebih memaksa karena disertai ancaman atau intimidasi.

Sebagai negara demokrasi, praktik komunikasi konfrontatif tentu sangat dilarang, karena dapat dikategorikan sebagai *negative campaign* dan *black campaign*. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur tata cara kampanye, namun sepertinya ada kesengajaan untuk dilanggar, bahkan menjadikan komunikasi konfrontatif sebagai agenda isi kampanye (*campaign content agenda*). Perilaku ini tentu saja mengabaikan etika politik yang seharusnya diterapkan ke dalam komunikasi politik.

Bila pengabaian—terutama dalam konteks penindakan atas pelanggaran—dibiarkan saja, maka boleh jadi hasrat agar pemilihan umum khususnya pemilihan presiden di negara kita akan berjalan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Artikel ini akan mengaitkan *das sollen* tentang komunikasi politik dengan *das sein* penerapan dalam praktik kampanye hingga terjadinya komunikasi konfrontatif.

Komunikasi Politik

Michael Rush dan Philip Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya di

antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pola pertukaran informasi di antara individu-individu dan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.

McNair (2011) memberikan definisi komunikasi politik sebagai “Semua bentuk komunikasi yang digunakan oleh politikus dan aktor atau pelaku politik lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Dari dua definisi tersebut tidak ada pemahaman bahwa komunikasi politik membolehkan penggunaan segala cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi yang merupakan *message* dalam komunikasi politik adalah informasi politik yang relevan. Relevan artinya sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati dalam sistem politik.

Jadi, secara ideal (*das sollen*) komunikasi politik pada hakikatnya tidak terpisahkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu prinsip-prinsip yang dipegang teguh secara universal oleh masyarakat yang bagi Indonesia dikenal sebagai “bebas dan bertanggungjawab”. Artinya, pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik tidak boleh melanggar etika, terutama karena Indonesia merupakan negara yang warganya plural atau majemuk. Sehingga sesungguhnya dalam penerapan komunikasi politik beriringan jalan dengan komunikasi lintas-budaya, antropologi komunikasi, sosiologi komunikasi, dan psikologi sosial. Suatu hal yang tidak mudah memahami dan menerapkannya bagi praktisi komunikasi politik (aktor politik, aktivis politik, pemimpin-pemimpin formal dan informal, masyarakat peduli politik, bahkan pengelola media massa dan media sosial). Untuk itu, sebaiknya fungsi partai politik terutama fungsi pendidikan politik—terutama dalam tahun politik ini—lebih disosialisasikan terutama oleh partai-partai politik. Para partai politik jangan hanya

sibuk memenangkan dirinya dalam berebut kursi di parlemen, atau juga menggalang suara sebanyak-banyaknya agar calon presiden yang diusung dan didukung berhasil menduduki RI-1, dengan segala cara tanpa mendidik rakyat agar *melek politik* dalam arti politik itu mulia dan harus dijalankan dengan santun, sejuak, dan bermartabat. Berbagai *statement* yang sampai ke masyarakat hendaknya tidak bersifat konfrontatif, mulai dari kontroversial, membingungkan, dan membenturkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi makin yakin bahwa “politik itu kotor” sebagaimana yang dipersepsikan selama ini. Komunikasi politik melalui pendidikan politik selayaknya menanamkan pemahaman bahwa berpolitik itu bagian dari “ibadah sosial”, pengabdian mulia kepada masyarakat. Bukan menanamkan nilai-nilai negatif seperti saling menghujat dan mencacimaki sebagaimana yang terjadi dalam media sosial selama ini, yang membuat kita semua *miris*. Keteladanan harus diberikan oleh para calon, terutama calon presiden, mulai dari bicara, sikap, dan perilaku, bahkan pola berpikir (*pattern of thinking*). Sebab, meskipun ada pengakuan bahwa masyarakat kita sudah kian cerdas, namun kenyataannya masih banyak yang menjadi *followers* yang *sami'na wa atho'na* (aku mendengar dan aku patuh) tanpa *reserve* pada sang pemimpin. Hiruk-pikuk yang terjadi di mana-mana di tahun politik ini bersumber dari keteladanan para elit yang merupakan sumber utama komunikasi politik.

Dalam buku lama, *Hubungan Insani* karya Onong Uchjana Effendy (1988) dijelaskan tentang arti kepemimpinan, sebagai berikut: Dalam pengertian umum, kepemimpinan menunjukkan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, memengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui suatu karya, seperti buku, lukisan, dan

sebagainya, atau melalui kontak pribadi antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka (*face to face*). Kepemimpinan melalui karangan atau ciptaan yang dituangkan dalam bentuk buku atau lukisan dapat dikatakan kepemimpinan yang tidak langsung, sebab sang pemimpin dalam usaha untuk memengaruhi tidak seketika pada saat ia melakukan kegiatan. Pemimpin-pemimpin jenis ini adalah para ilmuwan, seniman atau sastrawan yang hasil karyanya atau ide-idenya dapat memengaruhi orang lain.

Kepemimpinan yang bersifat tatap muka berlangsung melalui kata-kata secara lisan. Kepemimpinan jenis ini bersifat langsung karena sang pemimpin, dalam usahanya memengaruhi orang lain, bergiat langsung kepada sasarannya. Karena berhadapan muka, ia mengetahui seketika hasil kegiatan itu. Berkenaan dengan berkembangnya teknologi seperti radio dan televisi, kegiatan kepemimpinan melalui kata-kata lisan ini dapat lebih efektif dengan memperoleh sasaran yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kalau berhadapan muka.

Dengan kata lain, Onong Uchjana Effendy ingin mengatakan bahwa para pemimpin politik dalam komunikasi politik berada pada posisi yang sentral dan menentukan citra tentang diri dan golongannya.

Beberapa Istilah

Dalam komunikasi politik yang merupakan bagian dari relasi sosial, selain komunikasi konfrontatif, dikenal pula sejumlah istilah yang berkaitan dengannya, di antaranya konflik, konsensus, agitasi, propaganda. Istilah-istilah tersebut selalu melekat dalam komunikasi politik meskipun ada pula yang negatif sebagaimana komunikasi konfrontatif.

Teori konflik dalam ilmu politik banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, dan itulah yang biasanya disebut teori konflik kaum Marxian atau teori konflik Marxis. Selain teori konflik

Marxian, terdapat pula teori konflik non-Marxian yang dimunculkan ilmuwan sosial non-Marxis seperti George Simmel, Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, Seymour Lipset, dan lain-lain (Ujang Komarudin, 2016).

Dalam perspektif kaum Marxian, khususnya Marx, diasumsikan terdapat dua kelas dalam masyarakat yang selalu terlibat konflik, yaitu kelas orang-orang kaya (borjuis) dan kelas orang-orang miskin (proletar). Kedua kelas ini dibedakan oleh kepemilikan alat-alat produksi; kelas kaya terdiri dari orang-orang yang memiliki alat-alat produksi, sedangkan kelas miskin adalah mereka yang tidak memilikinya. Kelas kaya menindas kelas miskin melalui alat produksi. Akibat penindasan ini maka terjadilah perjuangan kelas dari kalangan kelas miskin. Marx menyebut sebagai konflik antarkelas dalam masyarakat. Pesan yang selalu dikumandangkan dalam perjuangan kelas itu yang paling mengemuka adalah “bersatulah kaum buruh sedunia”. Konflik yang diajarkan Marx ini memuncak dalam revolusi proletar di Rusia pada 1917. Revolusi yang bersumber dari konflik kaum miskin terhadap kaum kaya itu menggaung ke seluruh dunia termasuk Indonesia dengan deklarasi Republik Soviet Indonesia oleh Mr Amir Syarifuddin dan Musso.

Meskipun bukan penganut Marxis, di tahun 1949 Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam, yang diperjuangkannya dengan mengangkat senjata seperti Amir dan Musso. Pendirian ini juga disebabkan oleh konflik politik antara Kartosuwiryo dengan pemerintah yang sah di bawah pimpinan Bung Karno. Konflik-konflik lain yang pernah terjadi di antaranya antara pemerintah dengan PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta) di tahun 1958 dan konflik antara Dewan Revolusi pimpinan Letkol Untung dengan TNI/AD di tahun 1965. Teori konflik ini meskipun

dalam bentuk lain, masih dipraktikkan di beberapa negara termasuk Indonesia dengan lahirnya gerakan-gerakan radikal yang menjadi ancaman bagi setiap negara.

Berbeda dengan Marx adalah pandangan Ralf Dahrendorf, yang menyatakan bahwa apa yang dibayangkan Marx tentang revolusi kaum proletar ternyata tidak terjadi di negara-negara industri. Dahrendorf berpendapat, hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut atasan dan bawahan menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas. Dalam hubungan ini terdapat dikotomi antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Ada di antara mereka yang terlibat dalam struktur kekuasaan, sementara yang lainnya tidak; beberapa orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak. Bagi Dahrendorf, perjuangan kelas dalam masyarakat modern, baik dalam perekonomian kapitalis maupun komunias, dalam pemerintahan bebas dan otoriter, berada di seputar pengendalian kekuasaan. Jadi, lebih berdasarkan kekuasaan daripada pemilikan sarana-sarana produksi (Ujang Komaruddin, 2016).

Dalam pandangan Lipset, konflik ada kaitannya dengan demokrasi. Ancaman laten terhadap sistem demokrasi adalah mengerasnya konflik bagi demokrasi hingga mencapai tingkatan yang dapat mengacaukan masyarakat. Sebaliknya, konsensus adalah substansi penyelesaian konflik. Konsensus terbentuk bila pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi berhasil mencapai titik temu, yakni pendapat yang sama sehingga tidak ada masalah dalam hubungan sosial tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama mendapat keuntungan/manfaat yang wajar dari hubungan tadi.

Contoh dari konsensus ialah kesepakatan damai antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka yang berjuang mulai 1976. Kesepakatan damai

ini ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 (Sam Abede Pareno, 2017).

Selain konflik dan konsensus, hal yang tidak terpisahkan dengan komunikasi politik ialah agitasi dan propaganda. Sunarjo dan Djunaesih S. Sunarjo (1995) menyatakan bahwa agitasi berasal dari bahasa Inggris *agitation* yang artinya hasutan. Agitasi merupakan salah satu bentuk spesialisasi dalam ilmu komunikasi baik dengan cara tertulis ataupun secara lisan dengan membangkitkan ketidakpuasan, menimbulkan kegelisahan, membuat suatu kebingungan atau apabila kegelisahan, ketidakpuasan dan kebingungan tersebut sudah ada maka digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam praktik, agitasi jelas tidak dapat berdiri sendiri, karena itu dalam pelaksanaannya selalu bersamaan dengan propaganda, sehingga sering agak sukar membedakan antara bentuk agitasi dan bentuk propaganda. Namun, partai komunis di manapun biasanya menggabungkan agitasi dengan propaganda sehingga menjadi Agitasi-Propaganda atau Agitprop.

Menurut pengertian komunias, agitasi adalah tindakan untuk membangkitkan massa supaya mengadakan aksi politik berkenaan dengan sesuatu ketidakadilan sosial, sedangkan propaganda adalah suatu cara untuk mengemukakan banyak pikiran yang dapat membangkitkan aksi politik atas dasar kejadian atau keadaan yang sudah umum diketahui.

Agitasi dan propaganda selalu beriringan jalan digunakan dalam komunikasi politik dengan teknik koersif (paksaan), bahkan konfrontatif.

Masih ada lagi bentuk komunikasi politik, yaitu yang termasuk komunikasi interpersonal di antara calon-calon presiden yang biasanya didampingi oleh calon-calon wakil presiden, yaitu debat. Seharusnya debat merupakan upaya menampilkan visi-misi masing-masing calon kemudian dikritisi oleh calon

lainnya; seharusnya untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh rakyat dan negara. Tetapi, dalam praktiknya justru adalah saling menyalahkan dan mengalahkan di antara para calon sehingga sering tidak pernah membawa hasil yang mampu mengatasi problem berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah mendapatkan tepuk-tangan hadirin.

Pembahasan

Dalam komunikasi konfrontatif, teknik koersif yang berbentuk konflik, agitasi-propaganda, dan “debat kusir” (saling menyerang dan menjatuhkan) memang merupakan bentuk-bentuk yang mengiringi komunikasi politik terutama dalam kampanye pemilihan umum ataupun pemilihan presiden. Di tahun ini hingga menjelang April 2019—yang disebut tahun politik—rakyat dan negara Indonesia dihadapkan pada implementasi konflik, agitasi propaganda, dan “debat kusir”. Padahal, sebagaimana yang diungkapkan oleh EM Griffin (2003) yang mengutip Pierce tentang apa yang disebut “*dialogic communication, a new way to talk with others*” (komunikasi dialogis, satu cara baru untuk berbicara dengan yang lain). Dialogis adalah pembicaraan yang setara dan seimbang, dengan kesabaran untuk saling menghargai pihak lain. Bukan dengan tradisi bahwa pihak lain masih berbicara langsung dipotong untuk menyanggahnya bahkan menyerang pembicaraan lawan bicara. Dialogis menempatkan lawan bicara sebagai teman yang patut dihormati.

Suatu hal yang agaknya patut dibahas juga adalah media massa. Media komunikasi massa yang diasumsikan efektif untuk digunakan adalah media massa (suratkabar, radio, televisi), terutama televisi. Media massa menyajikan konflik, agitasi propaganda, dan “debat kusir” secara terang-terangan tanpa disembunyikan meskipun melalui *agenda setting* dan *framing* yang seolah-olah seimbang (*balanced*) namun sesungguhnya

sangat bergantung pada dana yang diterima dari pihak yang berkompetisi. Fenomena di Indonesia pada saat ini, keberpihakan media massa tidak hanya terletak pada siapa yang membayar iklan atau *news sponsor* lebih banyak, melainkan terletak pada perintah boss media massa yang pada umumnya terjun ke politik praktis; dan saat ini media massa kita dimiliki oleh mereka para pemimpin partai politik sehingga netralitas pers sulit diharapkan dalam komunikasi politik sebagaimana mestinya.

Pada gilirannya, pers dalam tahun politik ini telah berpartisipasi dalam menyosialisasikan komunikasi konfrontatif. Pers bukan saja telah mengubah diri sebagai “corong” kekuatan politik tertentu, melainkan juga saling berebut pasar di antara pers sendiri tanpa mempertimbangkan etika jurnalistik. Hak prerogatif pers berupa agenda setting dan framing telah melahirkan berita-berita yang jauh dari seimbang dan adil. Contoh konkret adalah betapa pers memuat dengan gamblang hasil-hasil survey yang menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain. Contoh kasus adalah survei tentang tingkat elektabilitas gubernur Jakarta; hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa calon X memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dan diberitakan oleh pers tanpa mempertimbangkan metodologi surveinya. Ternyata calon X yang diunggulkan itu kalah telak oleh calon Y. Hal-hal seperti ini tentu saja menurunkan kredibilitas pers yang merupakan media massa konvensional, sehingga khalayak cenderung memercayai media sosial yang sulit terkontrol dan sering menyebarkan berita-berita *hoax*.

Penutup

Menjelang penutup artikel ini, penulis ingin menyimpulkan bahwa komunikasi kontradiktif dapat terjadi karena hasrat untuk menempuh kehidupan demokrasi tidak disertai dengan

pemahaman yang matang tentang komunikasi politik. Pemahaman komunikasi politik baru pada tataran praktis pragmatis sehingga muncul bentuk komunikasi yang melahirkan konflik, agitasi propaganda, “debat kusir”. Sementara itu, konsensus dan komunikasi dialogis diasumsikan sebagai sesuatu yang “memperlambat” bahkan “merintang” aktor-aktor politik dalam meraih kemenangan. Dengan demikian, adalah sia-sia seruan ‘pemilu damai’ dan ‘pemilu bermartabat’ yang didengung-dengungkan selama ini.

Bagi media massa—khususnya yang konvensional—kembali menegakkan kaidah jurnalistik yang dianjurkan oleh jargon *peace journalism* merupakan suatu keniscayaan; karena sejatinya dalam komunikasi politik pers adalah benteng terakhir dalam menyosialisasikan dan memertahankan demokrasi. Pers yang sehat bukan pers yang kaya raya karena iklan ataupun rating. Pers yang sehat adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab, pers berintegritas tinggi pada demokrasi dan kesejahteraan lahir batin masyarakat.

Akhirnya, marilah kita semua khususnya yang akan mengikuti pesta demokrasi di tahun 2019 berusaha untuk menghilangkan komunikasi kontradiktif agar kehidupan demokrasi di Indonesia lebih terjamin dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Effendy, Onong Uchjana, 1988, *Hubungan Insani*. Bandung: Remadja Karya.
- Griffin, EM, *A First Look At Communication Theory*, 2003. USA: McGraw-Hill Higher Education.
- Komarudin, Ujang, 2016, *Ideologi Partai Politik Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia.
- McNair B, 2011, *An Introduction to Political Communication*. New

York: Routledge Taylor & Francis
Group.
Pareno, Sam Abede, 2017, *Gerakan
Ekstrem Tak Pernah Mati*.
Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Rush, Michael & Philip Althoff, 1997,
Pengantar Sosiologi Politik.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sunarjo, Djoenaesih S. Sunarjo, 1995,
Himpunan Istilah Komunikasi.
Yogyakarta: Liberty.